



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu pengaturan tentang pemberian dan penilaian, pemberhentian, pemotongan, pembiayaan dan mekanisme pengajuan dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang sebagaimana telah dirubah beberapa terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang;
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1C Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1C).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Pejabat Struktural yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya disebut JFT, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya berdasarkan perolehan angka kredit.
14. Jabatan Fungsional Umum selanjutnya disebut JFU, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh seorang PNS.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS kecuali PNS Guru yang bersertifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
18. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
19. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
20. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
21. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
22. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
23. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
24. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
25. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
26. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Insentif Pemungutan pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan pajak dan Retribusi. ✓

28. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota Semarang kepada Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
29. PNS yang dipcrbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
30. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit dan /atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
31. Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas adalah waktu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.
32. PNS yang dipkerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
33. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

## BAB II

### PEMBERIAN DAN PENILAIAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini merupakan pedoman pemberian TPP bagi PNS dan CPNS Tahun Anggaran 2016
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dalam satu Tahun Anggaran.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kriteria :
  - a. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
  - b. Pertimbangan Obyektif lainnya.
- (4) Kriteria Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (a) meliputi:
  - a. Orientasi Pelayanan;
  - b. Integritas;
  - c. Komitmen;
  - d. Disiplin;
  - e. Kerjasama;
  - f. Kepemimpinan.
- (5) Kriteria Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (f) hanya diberlakukan bagi pejabat struktural.
- (6) Pertimbangan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawai.
- (7) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) meliputi keterangan kehadiran, ijin, cuti dan presensi elektronik.
- (8) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. *2/*

### Pasal 3

PNS atau CPNS yang tidak berhak menerima TPP adalah yang :

- a. berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- b. berstatus penerima uang tunggu;
- c. berstatus tersangka dan ditahan
- d. berstatus terdakwa atau terpidana;
- e. tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar;
- f. cuti di luar tanggungan Negara;
- g. diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain;
- h. cuti besar;
- i. cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya;
- j. berstatus PNS Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi;
- k. PNS yang diberhentikan sementara;
- l. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
- m. menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- n. Tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan di bawah 50%;
- o. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih dalam 1 bulan.
- p. tidak mengumpulkan SKP Tahunan pada bulan berjalan dan baru akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut.

### Pasal 4

- (1) Pertimbangan Orientasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal.
- (2) Pertimbangan Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (b) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kejujuran, keikhlasan dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya dalam bekerja.
- (3) Pertimbangan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (c) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan bekerja dengan bersungguh-sungguh di atas kepentingan pribadi dalam pekerjaannya.
- (4) Pertimbangan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (d) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai ketaatan terhadap peraturan disiplin.
- (5) Pertimbangan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (e) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan bekerja sama serta menghargai pendapat orang lain di dalam organisasi.
- (6) Pertimbangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (f) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan bertindak tegas, memberi teladan yang baik, menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi serta mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas. ✖ /

### BAB III

#### PEMBERHENTIAN TPP

##### Pasal 5

- (1) TPP tidak diberikan dengan ketentuan:
  - a. tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan;
  - b. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan;
  - c. tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang;
  - d. tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;
  - e. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS dan CPNS yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi dengan alat finger print maupun secara manual.
- (2) Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung pada bulan berikutnya sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan dan telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pejabat penilai tidak berhak mendapatkan TPP apabila tidak melakukan penilaian Prestasi Kerja Tahunan tahun 2015 terhadap bawahan/PNS yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap PNS tidak berhak mendapatkan TPP apabila tidak membuat SKP Tahun 2016.

##### Pasal 6

- (1) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang telah menerima insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menentukan pilihan antara TPP dengan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berlaku bagi PNS yang bertugas di SKPD / Unit Kerja sebagai berikut:
  - a. Badan Lingkungan Hidup;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Bina Marga;
  - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - e. Dinas Kebakaran;
  - f. Dinas Tata Kota Dan Perumahan;
  - g. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame;
  - h. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
  - i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - k. Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga;
  - l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - n. Dinas Pasar;
  - o. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah;
  - p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - r. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
  - s. Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB IV

### PEMOTONGAN TPP

#### Pasal 7

- (1) Pemotongan TPP bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- potongan per hari kerja bagi PNS yang tidak masuk kerja sebesar 5% (lima persen) dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak;
  - potongan per hari kerja bagi PNS yang mengambil cuti alasan penting (menikah, menunggu keluarga yang sakit, haji, umroh, perjalanan rohani) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak;
  - bagi PNS yang mengambil cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP yang diterima sebelum dikurangi pajak;
  - bagi PNS yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 5 (lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja, dikenakan potongan sebesar 5% per hari kerja dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak, dan jika melebihi berlaku kelipatannya.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila:
- Ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan capaian nilai prestasi kerja tidak kurang dari 50%;
  - Cuti tahunan;
  - Cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
  - Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
  - Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan;
  - Mengikuti kegiatan Walikota (jurnal sehat, kerja bakti dan kegiatan lainnya).

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD.

#### Pasal 9

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

✓/

}

## DAB VI

### MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 10

- (1) Untuk pengajuan dan pembayaran TPP tahun 2016, bagi setiap PNS dan CPNS wajib dilampiri dokumen:
  - a. Penilaian Prestasi Kerja tahun 2015;
  - b. SKP Tahun 2016;
  - c. SKP Bulanan Tahun 2016;
  - d. Prestasi Kerja PNS Bulanan Tahun 2016.
  - e. Rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan;
  - f. Daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin dan kinerja selama 1 (satu) bulan;
  - g. Daftar pembayaran TPP selama 1(satu) bulan;
  - h. Data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, dan keterangan lainnya ke BKD, surat keputusan hukuman disiplin.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing masing SKPD, dikirim ke BKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- (4) Dokumen pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diperiksa dan telah sesuai/tidak ada kesalahan dibuatkan rekomendasi/salinan dokumen TPP yang diparaf dan ditandatangani oleh Kasubid. Kesejahteraan Pegawai atau oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Pegawai pada BKD.
- (5) Proses rekapitulasi kehadiran dan penilaian prestasi kerja untuk pembayaran TPP pada bulan Desember paling lambat tanggal 15 Desember.

#### Pasal 11

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh SKPD kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS/PNS di setiap SKPD diterimakan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan satu hari sebelumnya.

#### Pasal 12

PNS yang diangkat atau dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional, maka pemberian TPP jabatan struktural / jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan berikutnya setelah keputusan pengangkatan/pemindahan ditetapkan. \* /

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberian dan pemberhentian TPP dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari SKPD terkait lainnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Rapat Tim;
  - b. Rapat koordinasi Tim dengan SKPD yang terkait;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Kepada setiap pejabat struktural atau atasan langsung yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan Sanksi disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terhadap:
  - a. Pejabat struktural selaku atasan langsung yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar dalam hal pengendalian terhadap kriteria penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai dasar pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud Pasal 2; dan
  - b. Pejabat pengelola keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring dan Evaluasi terdapat tidak terbayarnya TPP yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bertanggung jawab untuk memproses pembayaran TPP PNS dimaksud dan memberikan sanksi hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a. Besaran setiap peringkat jabatan;
    - b. Tata cara verifikasi dan permintaan TPP;
    - c. Pelaksanaan pembayaran;
    - d. Kebenaran usulan pemberian TPP. ✓ /
- }

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

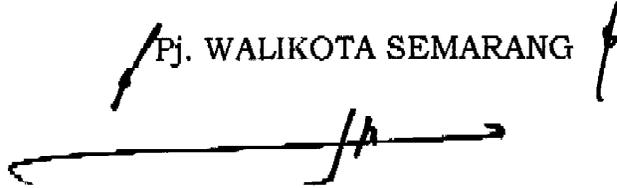
Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 48, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan pada Bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. WALIKOTA SEMARANG  
  
TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 38

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kriteria Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Pertimbangan Obyektif Lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ini harus memperoleh persetujuan DPRD dan diselaraskan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Presensi finger print dianggap sah apabila terlihat gambar wajah PNS yang bersangkutan dan presensi manual dianggap tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan tanggal kehadiran seperti misalnya mengisi daftar hadir satu bulan tapi diisi dalam satu hari.

—

1

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

←

↳

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Keuangan adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran (BP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
- Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas